RENSTRA
Rencana Strategis
KECAMATAN PREMBUN
TAHUN 2021 - 2026









KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Prembun pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Prembun ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Prembun di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Prembun, 24 September 2021

CAMAT PREMBUN

Dra.Hj. FARITA LISTIYATI, M.Si
Pembina
NIP. 19690515 19902 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR TABEL.....iv
DAFTAR BAGAN.....v
DAFTAR GAMBAR.....vi
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Landasan Hukum.....4
1.3. Maksud dan Tujuan.....11
1.4. Sistematika Penulisan.....11
BAB II.....13
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PREMBUN.....13
2.1. Gambaran Umum.....13
2.1.1 Aspek Geografi.....13
2.1.2 Aspek Iklim.....15
2.1.3 Aspek Pemerintahan.....16
89.1.2 Aspek Demografi.....18
89.1.3 Aspek Sosial.....19
89.1.3.1 Pendidikan.....19
89.1.3.2 Kesehatan.....20
89.1.3.3 Kesejahteraan.....21
89.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Prembun.....46
250.1.2 49
250.1.3 49
250.1.4 49
250.1.6 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....49
2.2.3. Sumber Daya Kecamatan Prembun.....58
2.2.3.1. Sumber Daya Aparatur.....58
2.2.3.2. Sarana dan Prasarana.....65
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun.....69
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan....81
BAB III.....83
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....83
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....83
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....90
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....96
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....96
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....98
BAB IV.....100
TUJUAN DAN SASARAN.....100
5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan.....100
BAB V.....102
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....102
5.1. Strategi.....102



BAB VI....104
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN....104
4.1. Rencana Program....104
4.2. Rencana Kegiatan....104
BAB VII....110
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....110
BAB VIII....112
PENUTUP....112
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi....112
8.2. Kaidah Pelaksanaan....113



DAFTAR TABEL



DAFTAR BAGAN



DAFTAR GAMBAR



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, serta Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi



antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Prembun dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Prembun untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen



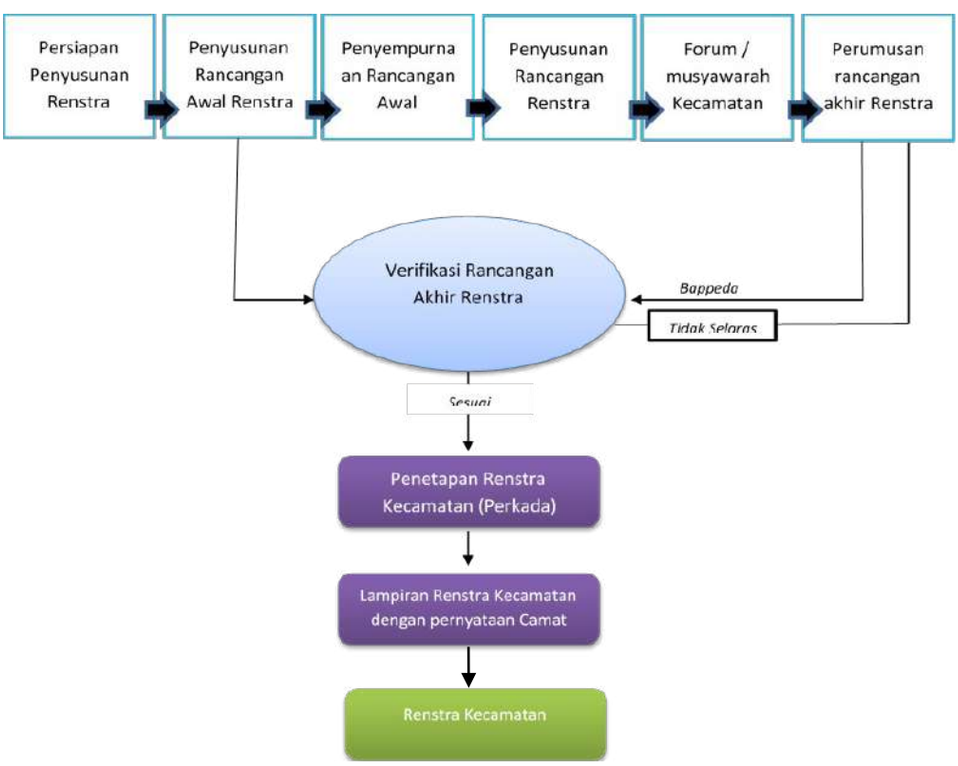
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prembun

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :

Bagan 1. 1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Prembun

~~Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Prembun~~



~~Bagan 1.1.~~
~~Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Prembun~~

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Prembun menyusun Rencana Strategis Ttahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Ttahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

~~17.~~

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);



32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (**Geopark**) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. ~~38.~~
39. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);



49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor **1** Tahun 201**5** tentang **Pengarusutamaan Gender** (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 201**5** Nomor **1**, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor **113**);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten~~Kabupetn~~ Kebumen Nomor 183);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan



58. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kaebupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Prembun adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Prembun ;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Prembun

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi



Kecamatan Prembun; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Prembun, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Prembun.

Bab III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Prembun; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT RW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Prembun ~~n~~ Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Prembun. selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI **Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

Bab VIII **Penutup**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Prembun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PREMBUN

2.1. Gambaran Umum

2.1.1 Aspek Geografi

Kecamatan Prembun merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak antara 7,63˚ - 7,68˚ Lintang Selatan dan 109,66˚ - 109,77˚ Bujur Timur. Terletak pada ketinggian antara 10 meter sampai dengan 32 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Seluruh desa di Kecamatan Prembun termasuk dataran. Secara keseluruhan, luas wilayah Kecamatan Prembun adalah 2.415 Ha. Desa Kabuaran merupakan desa terluas di Kecamatan Prembun, dengan luas sebesar 318 Ha atau 13,17 persen dari total luas wilayah Kecamatan Prembun. Adapun desa terkecil adalah Desa Pecarikan, dengan luas sebesar 101 Ha atau 4,18 persen dari luas wilayah Kecamatan Prembun. Adapun ~~Kecamatan Prembun merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan kecamatan yang berada dipaling Timur dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Prembun terletak antara 7.00-45.50 lintang selatan dan 109.00-37.00' bujur timur. Dengan luas 2.396,00 hektar atau 23,96 Km,~~ **batas wilayah** K~~k~~**ecamatan Prembun adalah sebagai berikut :**

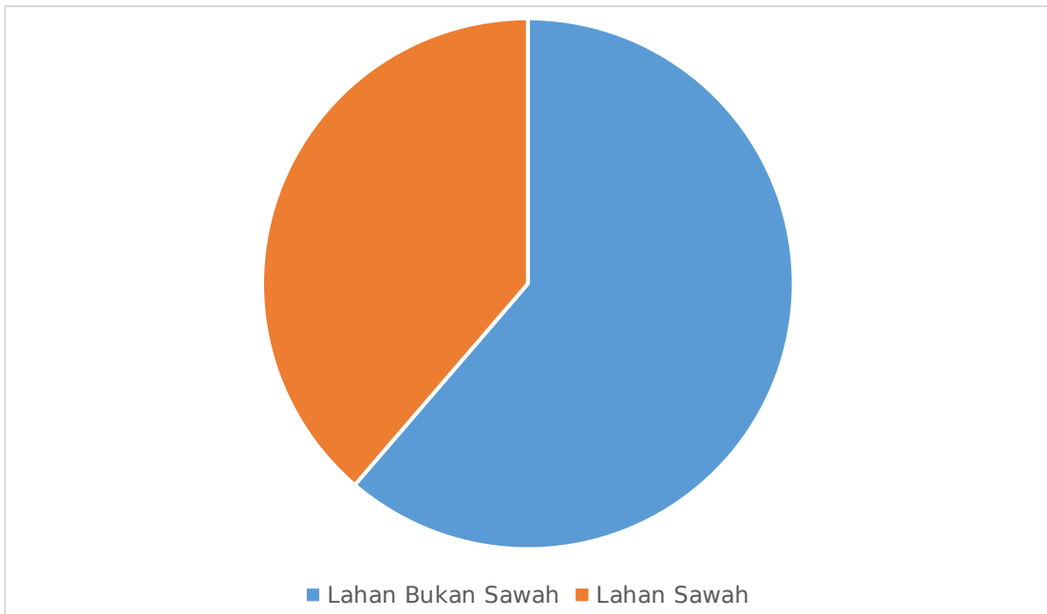
~~1.~~ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padureso
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit

Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Prembun





Gambar 2. 2 Persentase lahan sawah dan bukan sawah di Kecamatan Prembun



Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

Berdasarkan jenis lahan, lebih dari 61 persen lahan di Kecamatan Prembun adalah lahan bukan sawah. Jenis lahan ini diantaranya terdiri dari tegalan/kebun, tambak/kolam, hutan, dan bangunan permukiman. Selain itu, sekitar 39 persen lahan di Kecamatan Prembun adalah lahan sawah, baik sawah irigasi ataupun non irigasi.

Sementara itu secara geografis, Kecamatan Prembun relatif jauh dari Ibukota Kabupaten Kebumen. Desa Pecarikan merupakan wilayah dengan jarak ke Kantor Kabupaten Kebumen terjauh yaitu 26 Km, sedangkan wilayah terdekat adalah Desa Tersobo dengan jarak ke Kantor Kabupaten adalah 17 Km. Selain itu Desa Pecarikan juga menjadi desa dengan jarak ke Kantor Kecamatan Prembun terjauh, yakni 9 Km.

Gambar~~. 1~~



~~Peta Administrasi Kecamatan Prembun~~

2.1.2 Aspek Iklim

Saat ini pemanasan global sedang terjadi hampir di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada perubahan iklim yang relatif ektrim di beberapa wilayah. Perubahan iklim yang cukup ekstrim ini mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Sejak awal 2020 hingga Mei 2021, relatif tidak terjadi bencana alam di wilayah Kecamatan Prembun.

Tabel 2. 1 Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam yang Ada di Desa/Kelurahan di Kecamatan Prembun

No	Desa	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam*)	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi Bencana	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll
1	Tersobo	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prembun	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Kabekelan	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
4	Tunggalroso	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Kedungwaru	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Bagung	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
7	Sidogede	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Sembirkadipaten	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Kedungbulus	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Mulyosri	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Pesuningan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Pecarikan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Kabuaran	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

Pada dasarnya terdapat berbagai upaya antisipasi/mitigasi bencana alam. Upaya-upaya mitigasi tersebut antara lain Sistem peringatan dini bencana alam, Sistem peringatan dini khusus Tsunami, Perlengkapan Keselamatan, Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana serta Pembuatan, perawatan atau normalisasi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai dan lain-lain. Akan tetapi fasilitas terkait mitigasi bencana alam tersebut sepenuhnya belum tersedia di desa/kelurahan. Tercatat hanya lima desa yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam, dan belum terdapat desa yang mempunyai rambu-rambu atau jalur evakuasi



bencana. Adapun desa yang telah melakukan pembuatan, perawatan atau normalisasi sungai/tanggul tercatat sebanyak dua desa.

2.1.3 Aspek Pemerintahan

Kecamatan Prembun terdiri dari 13 desa. Berdasarkan struktur organisasi, terdapat tiga jenjang di bawah desa, yaitu Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Prembun memiliki 67 Dusun, 40 RW, dan 138 RT. Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, seorang Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, dan Pelaksana Teknis. Secara keseluruhan, Kecamatan Prembun mempunyai 13 Kepala Desa, 13 Sekretaris Desa, 38 Sekretariat Desa, dan 36 Pelaksana Teknis.

Tabel 2. 2 Banyaknya Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Prembun

No	Desa	Dusun	RW	RT
1	Tersobo	4	2	11
2	Prembun	11	7	22
3	Kabekelan	7	2	11
4	Tunggalroso	4	3	10
5	Kedungwaru	5	2	5
6	Bagung	5	4	12
7	Sidogede	6	4	12
8	Sembirkadipaten	5	3	7
9	Kedungbulus	2	2	5
10	Mulyosri	2	2	12
11	Pesuningan	5	3	10
12	Pecarikan	4	2	4
13	Kabuaran	7	4	17
	Jumlah	**67**	**40**	**138**

Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

Sebagian besar kepala desa di Kecamatan Prembun berumur 50 tahun ke atas dan mayoritas kepala desa berpendidikan SMA/sederajat, namun demikian, terdapat 2 kepala desa yang berpendidikan Diploma IV/S-1, yaitu Kepala Desa Tersobo dan Kabuaran. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, seluruh kepala desa di Kecamatan Prembun adalah laki-laki.

Tabel 2. 3 Kepala Desa Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan di Kecamatan Prembun



No	Desa	Usia				Pendidikan
		<30	30-39	40-49	>50	
1	Tersobo	-	-	1		D4/S1
2	Prembun	-	-	-	1	SMU
3	Kabekelan	-	-	-	1	SMU
4	Tunggalroso	-	-	-	1	SMU
5	Kedungwaru	-	-	-	1	SMP
6	Bagung	-	-	-	1	SMU
7	Sidogede	-	1	-	-	SMU
8	Sembirkadipaten	-	-	1	-	SMU
9	Kedungbulus	-	1	-	-	SMU
10	Mulyosri	-	-	1	-	SMU
11	Pesuningan	-	-	-	1	SMU
12	Pecarikan	-	-	1	-	SMU
13	Kabuaran	-	-	1	-	D4/S1
	Jumlah		**2**	**5**	**6**	

Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

3

4

5

6

7

8

9 Tabel 2.1.

10 Jumlah Penduduk Kecamatan PrembunTahun 2021

11

12	No.	**13**	Desa	**14**	Jenis Kelamin			**15**	Jumlah
				18	Laki-laki	**19**	Perempuan		
21	1.	**22**	Tersobo	**23**	1.316	**24**	1.320	**25**	2.636
26	2.	**27**	Prembun	**28**	1.928	**29**	2.228	**30**	4.156
31	3.	**32**	Kabekelan	**33**	1.096	**34**	1.021	**35**	2.117
36	4.	**37**	Tunggal Roso	**38**	1.295	**39**	1.356	**40**	2.651
41	5.	**42**	Kedungwaru	**43**	666	**44**	992	**45**	1.975
46	6.	**47**	Bagung	**48**	983	**49**	992	**50**	1.975
51	7.	**52**	Sidogede	**53**	1.834	**54**	1.715	**55**	3.549
56	8.	**57**	Sembirkadipaten	**58**	753	**59**	772	**60**	1.525
61	9.	**62**	Kedungbulus	**63**	541	**64**	772	**65**	1.313
66	10.	**67**	Mulyosri	**68**	1.091	**69**	1.235	**70**	2.326
71	11.	**72**	Pesuningan	**73**	997	**74**	991	**75**	1.988



76	~~1 2.~~	**77**	~~Pecarikan~~	**78**	~~495~~	**79** ~~544~~	**80** ~~1.039~~
81	~~1 3.~~	**82**	~~Kabuaran~~	**83**	~~1.416~~	**84** ~~1.321~~	**85** ~~2.737~~
86 ~~Total~~				**87**	~~14.411~~	**88** ~~14.927~~	**89** ~~29.338~~

89.1.1

~~89.1.2~~ Aspek Demografi

Penduduk merupakan modal penting pembangunan suatu wilayah. Penduduk bukan hanya sebagai objek, tetapi juga harus menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, data kependudukan sangat diperlukan oleh pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Prembun Tahun 2021

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tersobo	1.316	1.320	2.636
2.	Prembun	1.928	2.228	4.156
3.	Kabekelan	1.096	1.021	2.117
4.	Tunggalroso	1.295	1.356	2.651
5.	Kedungwaru	666	992	1.975
6.	Bagung	983	992	1.975
7.	Sidogede	1.834	1.715	3.549
8.	Sembirkadipaten	753	772	1.525
9.	Kedungbulus	541	772	1.313
10.	Mulyosri	1.091	1.235	2.326
11.	Pesuningan	997	991	1.988
12.	Pecarikan	495	544	1.039
13.	Kabuaran	1.416	1.321	2.737
Total		14.411	14.927	29.338

Sumber: SIPD Kecamatan Prembun, 2021

Berdasarkan tabel~~table~~ 2.~~1~~4. Kecamatan Prembun memiliki penduduk sebanyak 29.338 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.411 (49,12–%) dan_–perempuan_–sebanyak 14.927 (50,87–%), kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk–_p~~P~~erempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki._

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan ~~Prembun Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Prembun berjumlah 26.520 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 13.011 (49,10%) jiwa dan Perempuan berjumlah 13.509 (50,90%) jiwa. Dengan J~~jumlah rumah tangga di Kecamatan Prembun yang



sejumlah 7.446 rumah tangga dan . Dengan luas wilayah Kecamatan Prembun yang seluas 23,96 km² maka kepadatan penduduknya adalah 1.107 jiwa/km².

89.1.3 Aspek Sosial

89.1.3.1 Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan merupakan hal yang penting. Hal ini sebagai penunjang ketercapaian program wajib belajar 9 tahun. Secara keseluruhan, ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Prembun relatif baik. Kondisi ini tentu memudahkan seseorang apabila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.5 Banyaknya Sarana Pendidikan dan Jenisnya Menurut Desa di Kecamatan Prembun

No	Desa	KB/PAUD	TK/RA	SD/MI	SMP	SMA	PT
1	Tersobo	2	2	4	1	2	-
2	Prembun	1	3	6	3	1	-
3	Kabekelan	1	3	2	1	1	-
4	Tunggalroso	1	1	2	-	-	-
5	Kedungwaru	1	1	1	-	-	-
6	Bagung	1	1	1	1	-	-
7	Sidogede	1	1	2	1	2	-
8	Sembirkadipaten	1	1	1	1	-	-
9	Kedungbulus	1	1	1	-	-	-
10	Mulyosri	1	1	2	-	-	-
11	Pesuningan	2	2	2	-	-	-
12	Pecarikan	1	1	1	-	-	-
13	Kabuaran	2	1	2	1	-	-
	Jumlah	**16**	**19**	**27**	**9**	**6**	**0**

Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

Sarana pendidikan pra sekolah yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Roudatul Atfal (RA) telah relatif merata pada seluruh desa di Kecamatan Prembun. Banyaknya KB/Pos PAUD di Kecamatan Prembun tercatat sebanyak 16 unit, sedangkan Banyaknya TK/RA sebanyak 19 unit. Desa Prembun dan Kabekelan tercatat sebagai desa dengan Banyaknya TK/RA terbanyak di Kecamatan Prembun yakni masing-masing 3 unit. Pada jenjang Sekolah Dasar, terdapat dua jenis yakni sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sekolah Dasar (SD) dan sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI). Secara keseluruhan, Banyaknya SD di Kecamatan Prembun sebanyak 25 unit MI sebanyak 2 unit yang berada di Desa Tersobo dan Kabuaran.



Pada jenjang berikutnya, terdapat 6 unit SMP dan 3 unit MTs di Kecamatan Prembun. Lokasi SMP berada di Desa Prembun, Kabekelan, Sidogede, dan Kabuaran, sedangkan MTs berada di Desa Tersobo, Prembun, dan Sembirkadipaten. Sementara itu untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di Kecamatan Prembun terdapat 2 unit SMA, 1 unit Madrasah Aliyah (MA), dan 2 unit SMK.

89.1.3.2 Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan bersifat menyeluruh, terpadu, dan merata. Secara umum pelayanan kesehatan di Kecamatan Prembun bertumpu pada Rumah sakit dan Puskesmas. Pada 2020, Kecamatan Prembun memiliki 1 unit Rumah Sakit dan 1 unit Puskesmas tanpa rawat inap. Rumah sakit ini terdapat di Desa Prembun, sedangkan Puskesmas terdapat di Desa Kabuaran.

Tabel 2.6 Banyaknya Sarana Kesehatan dan Jenisnya Menurut Desa di Kecamatan Prembun

No	Desa	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Poliklinik /Balai Pengobatan	Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Praktek Bidan
1	Tersobo	-	-	-	1	4	-	1
2	Prembun	1	-	-	-	1	-	-
3	Kabekelan	-	-	-	-	3	-	-
4	Tunggalroso	-	-	-	-	-	-	-
5	Kedungwaru	-	-	-	-	-	-	1
6	Bagung	-	-	-	-	-	-	1
7	Sidogede	-	-	-	-	-	-	1
8	Sembirkadipaten	-	-	-	-	-	-	1
9	Kedungbulus	-	-	-	-	-	-	1
10	Mulyosri	-	-	-	1	-	-	2
11	Pesuningan	-	-	-	-	-	-	-
12	Pecarikan	-	-	-	-	-	-	-
13	Kabuaran	-	-	1	-	-	-	2
	Jumlah	**1**	**0**	**1**	**2**	**8**	**0**	**10**

Sumber: Kecamatan Prembun Dalam Angka, 2021

Selain Puskesmas, masyarakat Prembun juga memanfaatkan keberadaan poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, Poskesdes, dan Posyandu. Pada 2020, Kecamatan Prembun memiliki 2 poliklinik/balai pengobatan yang terletak di Desa Tersobo dan Mulyosri. Adapun tempat praktek dokter dan Poskesdes di Kecamatan Prembun masing-masing tercatat sebanyak 8 dan 11 unit. Sementara itu di Kecamatan Prembun juga terdapat 72 unit posyandu yang tersebar di seluruh desa. Posyandu ini memiliki kegiatan seperti penyuluhan/pendidikan dan memberikan makanan/minuman tambahan yang umumnya dilakukan sebulan sekali.



89.1.3.3 Kesejahteraan

Untuk melihat tingkat kesejahtaeraan masyarakat dapat dilihat dari data kemiskinan mikro di Kecamatan Prembun, data yang dipergunakan yaitu dengan menggunakan data DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data DTKS tahun 2020 merupakan data hasil pemutahiran Data Terpadu (BDT) oleh BPS tahun 2015. Data ini membagi kemiskinan dengan pemeringkatan menggunakan model *proxy mean test* yang hasilnya dikelompokan menjadi desil 1 sampai desil 4 yang mana merupakan 40% dari penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah yaitu hampir miskin (desil 4), rentan miskin (desil 3), miskin (desil 2) dan sangat miskin (desil 1).

Tabel 2.7 Data Rumah Tangga dan Individu menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan di Kabupaten Kebumen

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil3	Desil 4	Jumlah
1	PADURESO	662	1,026	594	168	2,450	2,997	3,314	1,434	438	8,183
2	BONOROWO	539	917	775	292	2,523	2,493	3,211	2,053	710	8,467
3	PONCOWARNO	749	897	531	150	2,327	3,641	3,055	1,429	400	8,525
4	SADANG	1,425	1,188	636	139	3,388	6,651	3,799	1,512	363	12,325
5	PREMBUN	**638**	**1,336**	**1,255**	**616**	**3,845**	**2,890**	**4,649**	**3,514**	**1,718**	**12,771**
6	ADIMULYO	492	1,361	1,555	911	4,319	2,385	5,064	4,627	2,474	14,550
7	KARANGANYAR	778	1,445	1,403	807	4,433	3,764	5,369	4,158	2,332	15,623
8	GOMBONG	637	1,324	1,570	983	4,514	3,142	5,241	4,992	3,075	16,450
9	KUTOWINANGUN	1,062	1,946	1,641	763	5,412	5,292	7,410	4,977	2,313	19,992
10	MIRIT	1,331	2,369	1,674	570	5,944	6,475	8,424	4,506	1,467	20,872
11	KUWARASAN	1,001	1,953	1,716	920	5,590	5,175	7,840	5,561	2,664	21,240
12	ROWOKELE	2,047	2,170	1,309	483	6,009	9,734	7,358	3,261	1,163	21,516
13	AYAH	976	2,316	2,054	901	6,247	4,615	8,520	6,197	2,474	21,806
14	BULUSPESANTREN	1,243	2,276	1,744	716	5,979	6,084	8,662	5,292	1,997	22,035
15	PURING	1,995	2,524	1,639	359	6,517	9,126	8,473	3,883	893	22,375
16	AMBAL	1,543	2,517	1,873	673	6,606	7,385	9,071	5,278	1,776	23,510
17	PEJAGOAN	1,533	2,070	1,585	711	5,899	7,970	8,182	5,283	2,237	23,672
18	SRUWENG	1,754	2,106	1,707	835	6,402	8,968	8,026	5,216	2,550	24,760
19	BUAYAN	2,081	2,537	1,851	566	7,035	9,920	8,728	4,762	1,443	24,853
20	PETANAHAN	1,055	2,493	2,254	1,190	6,992	5,114	9,760	7,028	3,289	25,191
21	KARANGSAMBUNG	2,816	2,225	1,255	376	6,672	13,879	7,604	3,348	977	25,808
22	KLIRONG	1,360	2,782	2,290	1,107	7,539	6,749	10,709	6,993	3,289	27,740
23	KARANGGAYAM	3,647	2,974	1,491	393	8,505	17,785	10,146	4,074	1,182	33,187
24	ALIAN	2,251	2,927	2,299	995	8,472	11,654	11,265	7,228	3,310	33,457
25	SEMPOR	3,304	3,284	2,222	1,008	9,818	16,111	11,581	6,637	3,184	37,513
26	KEBUMEN	2,289	4,227	3,554	2,031	12,101	11,790	17,098	12,162	6,619	47,669
	Total	39,208	55,190	42,477	18,663	155,538	191,789	202,559	125,405	54,337	574,090

Sumber: Basis Data Terpadu TNP2K Republik Indonesia, diakses dari http://bdt.tnp2k.go.id/sebaran/

Berdasarkan data tersebut, jumlah individu dengan tingkat kesejahteraan di bawah 40% di Kecamatan Prembun Tahun 2020 sejumlah 12.771 penduduk yang terdiri dari desil 1 (sangat miskin) sejumlah 2.890 penduduk, desil 2 (miskin) sejumlah 4.649 penduduk, desil 3 (hampir miskin) sejumlah 3.514 dan desil 4

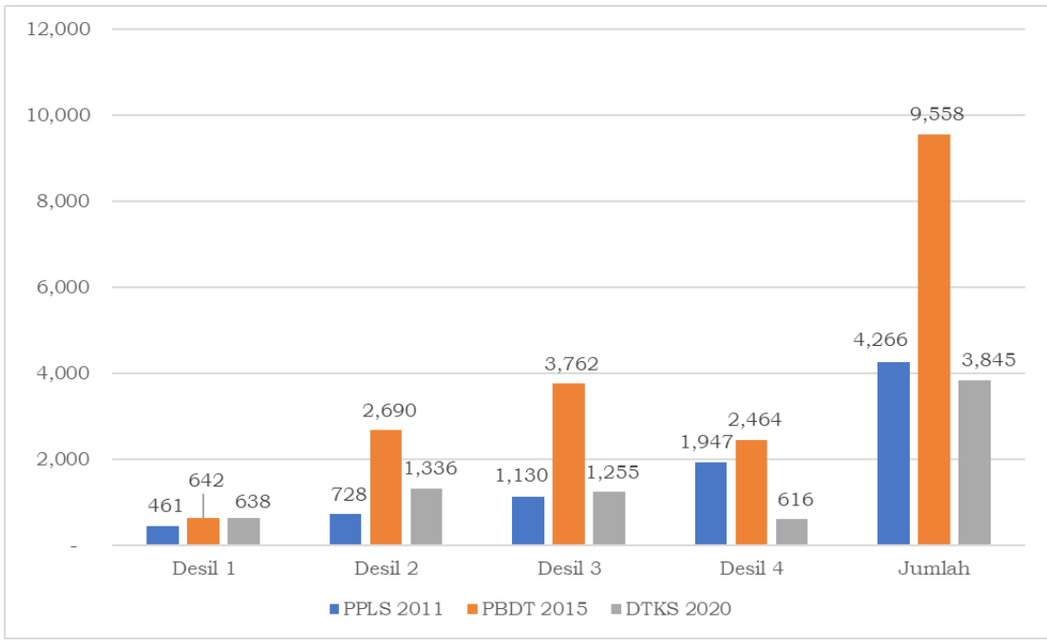


(rentan miskin) sejumlah 1.718 penduduk. Sedangkan jumlah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan di bawah 40% di Kecamatan Prembun Tahun 2020 sejumlah 3.845 rumah tangga yang terdiri dari desil 1 sejumlah 638 rumah tangga, desil 2 sejumlah 1.336 rumah tangga, desil 3 sejumlah 1.255 rumah tangga dan desil 4 sejumlah 616 rumah tangga.

Jumlah ini apabila dibandingkan dengan data PPLS Tahun 2021 dan PBDT Tahun 2015 sempat mengalami kenaikan pada data PBDT 2015 dan menurun pada pendataan DTKS 2020, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:~~Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Prembun terdiri dari Taman Kanak-Kanak 15 (limabelas) buah, sekolah SD/Sederajat sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, SMP/Sederajat sebanyak 6 (enam) buah, SMA/Sederajat sebanyak 3 (tiga) buah. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Prembun terdiri dari Rumah Sakit 1 (satu), Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, Pos Kesehatan Desa sebanyak 13 (tigabelas) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Prembun Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 2 (dua) buah, Pasar desa sebanyak 2 (dua) buah.~~

Tabel 2.8 Perbandingan Data Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan 40% terendah berdasarkan data PPLS 2011, PBDT 2015 dan DTKS 2020 di Kecamatan Prembun





Sumber: Data PPLS 2011, PBDT 2015 dan DTKS 2020, Data diolah

Jumlah rumah tangga berdasarkan DTKS 2020 mengalami penurunan sebesar 421 rumah tangga atau 9,87% dari PPLS 2011 sebesar 4.266 menjadi 3.845 rumah tangga walaupun sempat mengalami kenaikan pada pendataan PBDT Tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 9.558 rumah tangga. Desil 1, 2 dan 3 mengalami kenaikan jumlah sedangkan untuk desil 4 mengalami penurunan sebesar 1.331 rumah tangga atau 68,36% yaitu dari 1.947 pada PPLS 2011 menjadi 616 pada DTKS 2020.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan perlu ditetapkan determinan kemiskinan yang menjelaskan akar masalah yang dihadapi pada masing-masing dimensi kemiskinan non konsumsi (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar), yang diketahui berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan. Determinan kemiskinan juga menjelaskan daerah prioritas intervensi wilayah sebagai bahan intervensi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Determinan tersebut diselaraskan dengan indikator pada Indeks Desa Membangun yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam



secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memetakan wilayah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan berdasarkan prioritas penanggulangan kemiskinan, status Indeks Desa Membangun, dan Klasifikasi BUMDes sebagai berikut:

Tabel 2.9 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Status IDM dan Klasifikasi BUMDes Kecamatan Prembun

No	Desa	Prioritas Gulkin (2019)	Status IDM (2020)	Klasifikasi BUMDes (2020)
1	Sidogede	1) Prioritas 1	3) Berkembang	2) Tumbuh
2	Kabuaran	2) Prioritas 2	3) Berkembang	1) Dasar
3	Prembun	2) Prioritas 2	4) Maju	2) Tumbuh
4	Tunggalroso	3) Prioritas 3	3) Berkembang	1) Dasar
5	Kedungwaru	3) Prioritas 3	3) Berkembang	1) Dasar
6	Sembirkadipaten	3) Prioritas 3	3) Berkembang	1) Dasar
7	Kabekelan	3) Prioritas 3	3) Berkembang	2) Tumbuh
8	Pecarikan	3) Prioritas 3	3) Berkembang	3) Berkembang
9	Kedungbulus	3) Prioritas 3	3) Berkembang	~
10	Mulyosri	3) Prioritas 3	3) Berkembang	~
11	Bagung	3) Prioritas 3	4) Maju	1) Dasar
12	Pesuningan	3) Prioritas 3	4) Maju	1) Dasar
13	Tersobo	3) Prioritas 3	4) Maju	2) Tumbuh

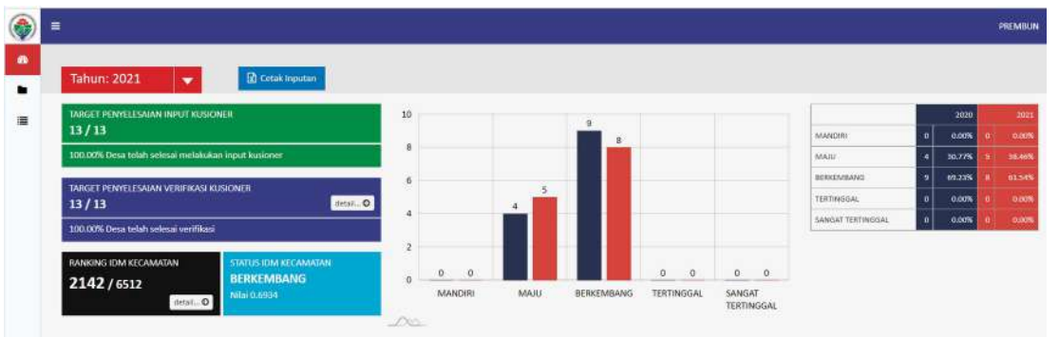
Sumber: TKPK Provinsi Jawa Tengah, 2021 diakses melalui http://tkpkd.bappeda.jatengprov.go.id/profil-wilayah/profil-wilayah-kabupaten-kebumen/

Untuk wilayah Kecamatan Prembun yang menjadi prioritas 1 program penanggulangan kemiskinan adalah Desa Sidogede, prioritas 2 ada 2 desa yaitu Desa Kabuaran dan Desa Prembun, sedangkan 9 desa yang lain menjadi prioritas 3. Data Prioritas tersebut disandingkan dengan status IDM desa tersebut, yang menarik walaupun Desa Prembun menjadi prioritas 1 namun status desanya sudah masuk kategori desa maju dan sudah memiliki BUMDes dengan kategori tumbuh. Berdasarkan data IDM Tahun 2020



tersebut jumlah desa dengan kategori maju sebanyak 4 (empat) desa dan berkembang sebanyak 9 (sembilan) desa. Pada Tahun 2021 jumlah desa dengan status maju bertambah menjadi 5 (lima) desa dan status berkembang menjadi 8 (delapan) desa.

Gambar 2.3 Perkembangan Status Indeks Desa Membangun di Kecamatan Prembun Tahun 2020 - 2021



Sumber: Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Capaian indeks pada masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Status Indeks Desa Membangun Menurut Desa di Kecamatan Prembun Tahun 2021

No.	Desa	Status Desa				
		IKS	IKE	IKL	IDM	Status
1	Tersobo	0,8400	0,8167	0,6000	0,7522	Maju
2	Prembun	0,8600	0,8333	0,6000	0,7578	Maju
3	Kabekelan	0,7143	0,6667	0,6667	0,6825	Berkembang
4	Tunggalroso	0,7657	0,4833	0,8667	0,7052	Berkembang
5	Kedungwaru	0,7886	0,5000	0,6667	0,6517	Berkembang
6	Bagung	0,8571	0,7167	0,6000	0,7246	Maju
7	Sidogede	0,8457	0,8000	0,4667	0,7041	Berkembang
8	Sembirkadipaten	0,7371	0,5333	0,6667	0,6467	Berkembang
9	Kedungbulus	0,7429	0,5833	0,5333	0,6198	Berkembang
10	Mulyosri	0,7600	0,4833	0,6667	0,6367	Berkembang
11	Pesuningan	0,7543	0,7833	0,6667	0,7348	Maju
12	Pecarikan	0,8114	0,6000	0,6000	0,6705	Berkembang
13	Kabuaran	0,7371	0,6500	0,8000	0,7290	Maju

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Deter Keragaman Produksi Masyarakat Desa Keragaman Produksi Masyarakat Desa minan pada Indeks Desa Membangun kemudian dijadikan dasar penentuan prioritas penanganan pada indikator per item yang telah di isi oleh masing-masing desa, selengkapnya sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Sosial

Dimensi Kesehatan

Kemiskinan merupakan akar dari setiap persoalan kesehatan. Dimensi ini mencakup 1) indikator pelayanan kesehatan yang meliputi jarak ke sarana kesehatan terdekat dan ketersediaan tenaga kesehatan, 2) indikator keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang meliputi akses ke poskesdes, polindes atau posyandu dan tingkat aktivitas posyandu, 3) indikator jaminan kesehatan yang meliputi tingkat kepesertaan BPJS.

Tabel 2.11 Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Pelayanan Kesehatan	Jarak ke sarana kesehatan terdekat	1	Prioritas
	Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, dokter dan nakes lain)	0.518461538	Prioritas
Keberdayaan Masyarakat Untuk Kesehatan	Akses ke poskesdes, polindes atau posyandu	0.923076923	Prioritas
	Tingkat Aktivitas Posyandu	1	Prioritas
Jaminan Kesehatan	Tingkat Kepesertaan BPJS	0.4	Sangat Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi kesehatan berdasarkan desa sebagaimana berikut:



Tabel 2.12 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Kesehatan berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Jarak ke sarana kesehatan terdekat	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, dokter dan nakes lain)	6 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Sembirkadipaten, Pecarikan, Kabekelan, Pesuningan	7 Desa meliputi: Desa Mulyosri, Kedungbulus, Kedungwaru, Sidogede, Tersobo, Bagung, Prembun
Akses ke poskesdes, polindes atau posyandu	1 Desa meliputi: Desa Prembun	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung
Tingkat Aktivitas Posyandu	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Tingkat Kepesertaan BPJS	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Tersobo	4 Desa meliputi: Desa Sidogede, Pesuningan, Bagung, Prembun



Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi Pendidikan

Dimensi ini mencakup 1) indikator akses pendidikan dasar dan menengah meliputi akses pendidikan dasar SD/MI < 3 KM, akses pendidikan SMP/MTs < 6 KM, akses pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM, 2) indikator akses pendidikan non formal meliputi kegiatan PAUD, kegiatan PKBM/Paket A-B-C, kegiatan kursus, 3) indikator akses pengetahuan masyarakat meliputi taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

Tabel 2.13 Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Akses Pendidikan Dasar, Menengah	Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	1	Prioritas
	Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	0.938461538	Prioritas
	Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	0.738461538	Prioritas
Akses Pendidikan Non Formal	Kegiatan PAUD	0.938461538	Prioritas
	Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	0.2	Sangat Prioritas
	Kegiatan Kursus	0.323076923	Sangat Prioritas
Akses Pengetahuan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	0.692307692	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi pendidikan berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.14 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Pendidikan berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus,



Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
		Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM	1 Desa meliputi: Desa Tunggalroso	12 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6 KM	4 Desa meliputi: Desa Sembirkadipaten, Kedungbulus, Kabekelan	9 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Pecarikan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Kegiatan PAUD	1 Desa meliputi: Desa Prembun	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung
Kegiatan PKBM/Paket A-B-C	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun	
Kegiatan Kursus	11 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus,	2 Desa meliputi: Desa Pecarikan, Tersobo,



Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
	Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Bagung, Prembun	
Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa	5 Desa meliputi: Desa Mulyosri, Kabekelan, Pesuningan, Tersobo, Prembun	8 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kedungwaru, Sidogede, Bagung

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi Modal Sosial

Dimensi ini mencakup 1) indikator solidaritas sosial yang meliputi kebiasaan gotong royong, keterbukaan ruang publik, terdapat kelompok olahraga, terdapat kegiatan olahraga, 2) indikator toleransi yang meliputi keragaman suku/etnis di desa, bahasa sehari-hari warga desa, agama mayoritas warga desa, 3) indikator rasa aman warga desa yang meliputi tersedianya sarana poskamling di desa, partisipasi warga siskamling, kejadian perkelahian masal di desa, dan 4) indikator kesejahteraan sosial yang meliputi terdapat akses ke sekolah luar biasa dan terdapat penyandang kesejahteraan sosial.

Tabel 2.15 Prioritas Intervensi Dimensi Modal Sosial Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Solidaritas Sosial	Kebiasaan gotong royong	0.984615385	Prioritas
	Keterbukaan ruang publik	1	Prioritas
	Terdapat kelompok olahraga	0.230769231	Sangat Prioritas
	Terdapat kegiatan olahraga	0.4	Sangat Prioritas
Toleransi	Keragaman suku/etnis di desa	0.446153846	Sangat Prioritas
	Bahasa sehari-hari warga desa	0.630769231	Prioritas



Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
	Agama mayoritas warga desa	0.692307692	Prioritas
Rasa Aman Warga Desa	Tersedianya sarana poskamling di desa	1	Prioritas
	Partisipasi warga siskamling	1	Prioritas
	Kejadian perkelahian masal di desa	0.938461538	Prioritas
Kesejahteraan Sosial	Terdapat akses ke sekolah luar biasa	0.984615385	Prioritas
	Terdapat penyandang kesejahteraan sosial	0.938461538	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi modal sosial berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.16 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Modal Sosial berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Kebiasaan gotong royong	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Keterbukaan ruang publik	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede,



Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
		Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Terdapat kelompok olahraga	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung	1 Desa meliputi: Desa Prembun
Terdapat kegiatan olahraga	8 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Pesuningan, Tersobo	5 Desa meliputi: Desa Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Bagung, Prembun
Keragaman suku/etnis di desa	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Kabekelan, Kedungwaru, Pesuningan, Tersobo,	4 Desa meliputi: Desa Pecarikan, Sidogede, Bagung, Prembun
Bahasa sehari-hari warga desa	6 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Kedungbulus, Kabekelan, Kedungwaru, Pesuningan	7 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Sembirkadipaten, Pecarikan, Sidogede, Tersobo, Bagung, Prembun
Agama mayoritas warga desa	5 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Kedungbulus, Pecarikan, Kedungwaru	8 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Sembirkadipaten, Kabekelan, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Tersedianya sarana poskamling di desa	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten,



Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
		Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Partisipasi warga siskamling	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Kejadian perkelahian masal di desa	1 Desa meliputi: Desa Bagung	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Prembun
Terdapat akses ke sekolah luar biasa	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Terdapat penyandang kesejahteraan sosial	1 Desa meliputi: Desa Prembun	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/



Dimensi Permukiman

Dimensi ini mencakup 1) indikator akses air bersih dan layak minum meliputi mayoritas warga memiliki sumber air layak minum, akses warga memiliki air mandi dan mencuci, 2) indikator akses ke fasilitas sanitasi yang meliputi mayoritas warga memiliki jamban, terdapat tempat pembuangan sampah, 3) indikator akses ke fasilitas listrik yang meliputi jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik, 4) indikator akses fasilitas informasi dan komunikasi yang meliputi warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat, akses internet di kantor desa dan terdapat akses internet untuk warga.

Tabel 2.17 Prioritas Intervensi Dimensi Permukiman Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Akses air bersih dan layak minum	Mayoritas warga memiliki sumber air layak minum	0.938461538	Prioritas
	Akses warga memiliki air mandi dan mencuci	0.892307692	Prioritas
Akses ke fasilitas sanitasi	Mayoritas warga memiliki jamban	1	Prioritas
	Terdapat tempat pembuangan sampah	0.830769231	Prioritas
Akses ke fasilitas listrik	Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik	1	Prioritas
Akses fasilitas informasi dan komunikasi	Warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat	0.907692308	Prioritas
	Akses internet di kantor desa	1	Prioritas
	Terdapat akses internet untuk warga	0.938461538	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi permukiman berdasarkan desa sebagaimana berikut:



Tabel 2.18 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Permukiman berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Mayoritas warga memiliki sumber air layak minum	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Akses warga memiliki air mandi dan mencuci	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Mayoritas warga memiliki jamban	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Terdapat tempat pembuangan sampah	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus,



Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
		Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Warga memiliki telepon seluler dan sinyal kuat	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Akses internet di kantor desa	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Terdapat akses internet untuk warga	1 Desa meliputi: Desa Sidogede	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Indeks Ketahanan Ekonomi

Dimensi keragaman produksi

Dimensi ini mencakup keragaman produksi masyarakat desa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.19 Prioritas Intervensi Dimensi Keragaman Produksi Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Keragaman produksi masyarakat desa	Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	0.784615385	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi keragaman produksi berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.20 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Keragaman Produksi berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk	3 Desa meliputi: Desa Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungwaru,	10 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi perdagangan

Dimensi ini mencakup indikator tersedianya pusat perdagangan yang meliputi akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen), terdapat pasar desa, terdapat sektor perdagangan (warung minimarket).

Tabel 2.21 Prioritas Intervensi Dimensi Perdagangan Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Tersedianya pusat perdagangan	Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	0.446153846	Sangat Prioritas
	Terdapat Pasar Desa	0.446153846	Sangat Prioritas
	Terdapat Sektor	1	Prioritas



Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
	Perdagangan (warung minimarket)		

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi perdagangan berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.22 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Perdagangan berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan (Pertokoan, Pasar Permanen)	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Prembun	4 Desa meliputi: Desa Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung
Terdapat Pasar Desa	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kedungwaru, Tersobo, Bagung	4 Desa meliputi: Desa Kabekelan, Sidogede, Pesuningan, Prembun
Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket)		13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi akses distribusi

Dimensi ini mencakup indikator akses distribusi logistic yang meliputi kantor pos dan jasa logistik.



Tabel 2.23 Prioritas Intervensi Dimensi Akses Distribusi Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Akses Distribusi Logistik	Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik	0.246153846	Sangat Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi akses distribusi berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.24 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Perdagangan berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Terdapat kantor pos dan jasa logistik	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Pesuningan, Bagung	4 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Sidogede, Tersobo, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi akses kredit

Dimensi ini mencakup indikator akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan yang meliputi tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR dan akses penduduk ke kredit.

Tabel 2.25 Prioritas Intervensi Dimensi Akses Kredit Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Akses terhadap lembaga keuangan dan perkreditan	Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR	0.507692308	Prioritas
	Akses penduduk ke kredit	0.507692308	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/



Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi akses kredit berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2. 26 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Akses Kredit berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Tersedianya lembaga pebankan umum dan BPR	4 Desa meliputi: Desa Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Tersobo,	9 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Bagung, Prembun
Akses penduduk ke kredit	6 Desa meliputi: Desa Mulyosri, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Pesuningan	7 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Sembirkadipaten, Sidogede, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi Lembaga Ekonomi

Dimensi ini mencakup indikator lembaga ekonomi yang meliputi tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/BUMDes dan terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.

Tabel 2.27 Prioritas Intervensi Dimensi Lembaga Ekonomi Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Lembaga Ekonomi	Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/BUMDes	0.661538462	Prioritas
	Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	0.584615385	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi lembaga ekonomi berdasarkan desa sebagaimana berikut:



Tabel 2.28 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Lembaga Ekonomi berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/BUMDes	1 Desa meliputi: Desa Mulyosri,	12 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Terdapat Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi Keterbukaan Wilayah

Dimensi ini mencakup indikator keterbukaan wilayah yang meliputi terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi), jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kualitas jalan desa.

Tabel 2.29 Prioritas Intervensi Dimensi Keterbukaan Wilayah Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Keterbukaan wilayah	Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)	0.692307692	Prioritas
	Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih	0.938461538	Prioritas



Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
	Kualitas jalan desa	0.984615385	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi keterbukaan wilayah berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.30 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Keterbukaan Wilayah berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi)	4 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Pecarikan, Kedungwaru, Bagung	9 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Kabekelan, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Prembun
Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1 Desa meliputi: Desa Tunggalroso	12 Desa meliputi: Desa Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Kualitas jalan desa	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/





Indeksi Kualitas Lingkungan
Dimensi Kualitas Lingkungan

Dimensi ini mencakup indikator Kualitas lingkungan yang meliputi pencemaran air, tanah dan udara.

Tabel 2.31 Prioritas Intervensi Dimensi Kualitas Lingkungan Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, tanah dan udara	0.923076923	Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi kualitas lingkungan berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.32 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Kualitas Lingkungan berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Pencemaran air, tanah dan udara	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana

Dimensi ini mencakup 1) indikator potensi rawan bencana yang meliputi kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan), 2) indikator tanggap bencana yang meliputi upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam.



Tabel 2.33 Prioritas Intervensi Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana Kecamatan Prembun Tahun 2021

Perangkat Indikator	Indikator Per Item	Nilai Rata-Rata Kecamatan	Prioritas Penanganan
Potensi rawan bencana	Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	0.892307692	Prioritas
Tanggap Bencana	Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	0.123076923	Sangat Prioritas

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/

Pemetaan wilayah prioritas untuk meningkatkan capaian pada dimensi potensi dan tanggap bencana berdasarkan desa sebagaimana berikut:

Tabel 2.34 Pemetaan Wilayah Prioritas Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana berdasarkan desa di Kecamatan Prembun

Indikator	Sangat Prioritas	Prioritas
Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)	-	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun
Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam	13 Desa meliputi: Desa Tunggalroso, Kabuaran, Mulyosri, Sembirkadipaten, Kedungbulus, Pecarikan, Kabekelan, Kedungwaru, Sidogede, Pesuningan, Tersobo, Bagung, Prembun	-

Sumber: Data diolah dari Kementerian Desa dan PDT, 2021 diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/



89.2 Gambaran Pelayanan Kecamatan Prembun

90 Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Prembun, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan.

91

92

93 Tabel 2.2.

94 *Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan Prembun Tahun 2021*

95 *Sumber: Sekreatriat Kecamatan Prembun Tahun 2021*

96

97 Berdasarkan table 2.2. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Prembun Tahun 2021 dari 13 (tiga belas) desa, 8 (delapan) desa dengan status Berkembang dan 5 (lima) desa dengan status Maju.

98 Kondiri jalan Kecamatan sebagai besar sudah beraspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 95%, akses internet lancar 13 Desa.

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115 Tingkat kemiskinan di Kecamatan Prembun masih tinggi, dari 13.211 KK yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3.748 KK dan Penerima Program PKH 2.400 KK. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan Prembun dapat dilihat pada tabel berikut :

116

117 Tabel 2.2

118 Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Prembun Tahun 2021



119 N	**120** DESA	**121** Pra Sejahtera	**122** Keluarga Sejahtera				**123** JUMLAH
			~~**127** I~~	~~**128** I I~~	~~**129** I II~~	~~**130** - I I I +~~	



132	1	133 Tersobo	134 123	135 111	136 99	137 40	138 9	139 415
140	2	141 Prembun	142 218	143 103	144 201	145 126	146 19	147 717
148	3	149 Kabekelan	150 148	151 112	152 81	153 99	154 11	155 464
156	4	157 Tunggalroso	158 211	159 144	160 38	161 42	162 14	163 504
164	5	165 Kedungwaru	166 117	167 484	168 199	169 45	170 12	171 988
172	6	173 Bagung	174 115	175 81	176 70	177 159	178 29	179 473
180	7	181 Sidogede	182 340	183 53	184 288	185 43	186 14	187 497
188	8	189 Sembirkadipaten	190 157	191 82	192 74	193 73	194 6	195 352
196	9	197 Kedungbulus	198 109	199 147	200 121	201 74	202 7	203 563
204	1	205 Muyosri	206 175	207 181	208 193	209 77	210 36	211 701
212	1	213 Pesuningan	214 165	215 165	216 120	217 64	218 16	219 549
220	1	221 Pecarikan	222 82	223 107	224 102	225 57	226 27	227 442
228	1	229 Kabuaran	230 235	333	217	172	27	934
236		237	238	239	240	241	242	243
244 JUMLAH TOTAL			245 2.195	3.689	2.914	2.131	447	13.211



250.1.1

~~**250.1.2 Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 13.211, terdapat 7.719 KK miskin atau (58,43%).**~~

~~**250.1.3 Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Prembun, terdapat Pasar modern (mini** **market) sebanyak 3 buah, Pasar desa sebanyak 6 buah, Pasar Pemda sebanyak 1 buah, dan Pasar-pasar**~~

~~**250.1.4 Musiman 3 buah, yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan di Desa Wiromartan, Desa Tlogodepok dan Desa Tlogopragoto. Sedangkan SPBU ada 1 (satu) di Desa Tlogopragoto.**~~

~~**250.1.5**~~

~~**250.1.6**~~ **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Prembun merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan ~~dan Kelurahan~~ dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Prembun dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen ~~Kebumen~~ Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;



9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian Prembun dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Prembun berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

   Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

   Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

   a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
   b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
   d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
   e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kecamatan;



f. Pengoordinasian Pelaksanaan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub Bbagian Perencanaan dan Keuangan ;-dan Sub Bbagian Umum dan Kepegawaian. Sub Bbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Sub Bbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
b. Sub Bbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah-tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.



3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;



i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang--undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadiberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,



pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;



j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang ~~beradadi~~berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan~~kan~~ teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

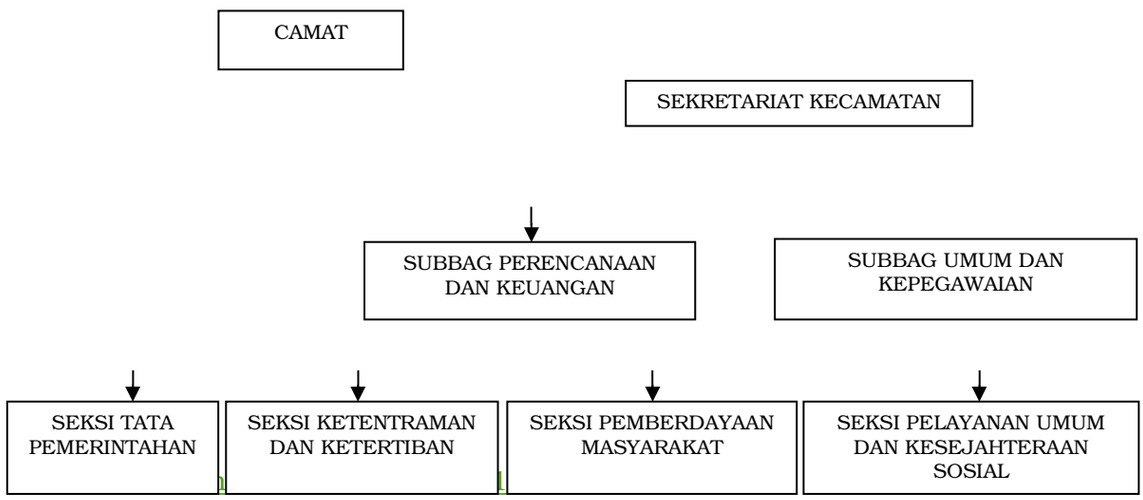
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. ~~pelaksanakan~~pelaksanaan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;



f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 2. 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Prembun



~~Bagan 2.1.~~
~~Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Prembun~~

2.2.3. Sumber Daya Kecamatan Prembun

2.2.3.1. Sumber Daya Aparatur

2.2.3.1.1. Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35 Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Prembun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 - 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	18	18	17	15	11	5
2	Perempuan	5	5	5	6	6	9
Jumlah		**23**	**23**	**22**	**21**	**17**	**14**

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

~~Tabel 2.3.~~
~~Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021~~
~~*Sumber : Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021*~~



~~Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jumlah Jabatan dan Jenis kelamin Dari~~ Jjumlah jabatan struktural di Kecamatan Prembun untuk Eselon III.a sejumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b (satu) personil, Eselon IV.a 4~~3~~ (empat~~tiga~~) personil, ~~dan 1 (satu) Plt.,~~ Eselon IV.b 2 (dua) personil. Sedangkan komposisi sumber daya manusia aparatur menurut jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

~~dapat dilihat dalam tabel 2.4.~~

Tabel 2.36 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur menurut jabatan dan jenis kelamin di Kecamatan Prembun Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	-	1	III.a	1
2	Sekretaris Camat	1	-	III.b	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	IV.b	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	IV.b	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	IV.a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	IV.a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	IV.a	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	IV.a	1
9	Staf	4	4	-	8
Jumlah		**5**	**9**		**14**

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

~~Tabel 2.4~~

~~Komposisi Sumber Daya Aparatur menurut Jabatan~~

~~Tahun 2021~~

~~a. *Sumber : Kecamatan Prembun, Juni 2021.*~~



2.2.3.1.2. Pegawai berdasarkan

~~**2.2.3.1.3. Dari jumlah jabatan struktural di Kecamatan Prembun untuk Eselon III.a jumlah 1 (satu) personil, Eselon III.b (satu) personil , Eselon IV.a 3 (tiga) dan 1 (satu) Plt., Eselon IV.b 2 (dua) personil, 1 (satu) Plt.**~~

~~**2.2.3.1.4.**~~

~~**2.2.3.1.5.**~~ **Tingkat Pendidikan**

~~Gambaran pegawai Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasar tingkatan pendidikan~~ Dari jumlah 14 personil Kecamatan Prembun, 5 (lima) personil atau 36% berpendidikan sarjana dan 9 (Sembilan) personil atau 64% berpendidikan SLTA sederajat. Kondisi tersebut belum memenuhi standar hasil analisis beban kerja yang ada. Karena Pendidikan memberikan pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas. Selengkapnya dapat ~~dapat~~ dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.37 Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Prembun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-IV	D-II	SLTA	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Camat	1	-	-	-	-	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	-	-	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	1
9	Pengadministrasi Umum	-	-	-	-	6	6
10	Pengadministrasi Kependudukan	-	-	-	-	1	1
11	Bendahara	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	2	3	0	0	9	14

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

2.2.3.1.6. Tabel ~~2.5~~

~~2.2.3.1.7. Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Tingkat Pendidikan~~

~~2.2.3.1.8.~~

~~2.2.3.1.9.~~ Sumber : ~~Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen 2021~~

~~2.2.3.1.10.~~

~~2.2.3.1.11.~~

~~2.2.3.1.12.~~ Dari jumlah ~~17 personil tersebut 41% pendidikan sarjana, 64% pendidikan SLTA sederajat. Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Prembun belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada. Karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Prembun dalam kelancaran pelaksanaan tugas.~~

~~2.2.3.1.13.~~

~~2.2.3.1.14.~~ Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah ~~Gambaran pegawai Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasar jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.~~pegawai sejumlah 14 (empat belas) personil terdiri dari 5 (lima) personil laki-laki dan dan 9 (sembilan) personil perempuan. Dari



jumlah tersebut posisi jabatan struktural hampir semua diisi oleh perempuan, kecuali posisi sekretaris kecamatan, untuk posisi Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diisi oleh perempuan. Sedangkan pada posisi staf atau pengadministrasi jumlah nya seimbang antara personil laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing 4 (empat) personil.



Tabel 2.38 Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Prembun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretaris Camat	1		1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	1	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	1	1
9	Pengadministrasi Umum	4	2	6
10	Pengadministrasi Kependudukan	-	1	1
11	Bendahahara	-	1	1
Jumlah		**5**	**9**	**14**

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

~~Tabel 2.6~~

~~Pegawai Kecamatan Prembun Berdasar Jenis Kelamin~~

~~*Sumber: Kecamatan Prembun , Juni 2021.*~~

~~**Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk Kecamatan Prembun selisihnya masih terlalu jauh, selilishnya 11:6 karena laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan 10 orang.**~~



~~2.2.3.1.15.~~ Pegawai Bberdasarkan Golongan

Jumlah Golongan IV sebanyak 2 (dua) personil, Golongan III sebanyak 8 (delapan) personil dan Golongan II sebanyak 4 (empat) personil. Masing-masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian hanya mempunyai 1 orang staf sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal. **Gambaran** ~~pegawai~~ Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasar golongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Prembun Menurut Golongan Tahun 2021

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	1	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-
5	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	-
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9	Pengadministrasi Umum	-	4	2	-	6
10	Pengadministrasi Kependudukan	-	-	1	-	1
11	Bendahara	-	-	1	-	1
Jumlah		**0**	**4**	**8**	**2**	**14**

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

~~Tabel 2.7.~~
~~Pegawai Kecamatan Prembun berdasarkan Golongan~~
~~*Sumber: Kecamatan Prembun, Juni 2021.*~~



~~Jumlah Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 10 orang dan Golongan II sebanyak 5 orang. Masing masing Kasi mempunyai staf 1 orang sehingga untuk pelaksanaan tugas tugas kurang maksimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Prembun , meneakup Sumber Daya Manusia dan asset berupa sarana dan prasarana penunjang.~~

~~Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Prembun sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Pemerintahan Kecamatan dan Sekretaris Kecamatan selaku koordinator sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Camat. Tugasnya, membantu Camat di bidang administrasi dan pelayanan umum disamping itu dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu 5 (lima) Kepala Seksi sebagai pelaksana tugas di bidangnya masing masing, serta 2 (dua) Kepala Sub Bagian di sekreatriat.~~

~~2.2.3.2.~~ Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Prembun secara umum ~~baik dan~~ belum memadai. Bangunan Kantor yang tersedia belum memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan. ~~, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.~~ Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, dan Aula Kecamatan telah tersedia namun belum disupport dengan sarana yang memadai dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.~~sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan~~ Selain ~~,~~itu juga belum tersedia ruang arsip guna penyimpanan arsip yang baik dan rapi.

~~Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :~~



Tabel 2. 40 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Prembun

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 TAHUN	PERLU PENAM-BAHAN	PERLU PEMELI-HARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Bangunan Gedung							
Pendopo Eks Kawedanan Prembun	0	1	0	1	1	0	1
Rumah Dinas Eks Pembantu Bupati	0	1	0	1	1	0	1
Gedung Kantor Kecamatan (Utara)	1	0	0	1	0	0	1
Gedung Kantor Kecamatan (Selatan)	1	0	0	1	0	0	1
Gedung Kantor Eks Rumah Dinas Camat	1	0	0	1	0	0	1
Mushola Kecamatan	1	0	0	1	0	0	0
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	0	0	1
Sepeda Motor	3	1	6	10	0	0	10
Sepeda Motor Kades	0	13	0	13	13	0	13
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Laptop	5	4	2	11	0	1	11
Personal Komputer Lainnya	0	2	3	5	0	0	5
Printer	5	2	3	10	0	0	10
A.C. Split	3	2	0	5	0	0	5
Mesin Ketik Manual Portable	0	2	0	2	0	0	2
Screen Mate White Standard	1	0	0	1	1	1	1
Speaker Aktif	1	0	0	1	1	1	1
Audio Cassette Recorder	1	0	0	1	0	0	1
Pesawat Telephone	1	0	0	1	0	0	1
Camera Digital SLR 600 D	1	0	0	1	0	1	1
Audio Mixer	1	0	0	1	0	0	1
Dynamic Microphon	0	3	0	3	0	0	3
LCD Projector/Infokus	1	0	0	1	0	1	1
Sice	1	0	0	1	0	0	1
Kipas Angin	2	2	0	4	0	0	4
Televisi	0	0	1	1	1	1	1
Amplifier	0	0	0	0	0	0	0
Loundspeaker	0	3	0	3	0	0	3
Sound System	1	0	0	1	0	0	1
Tustel	1	0	0	1	0	0	1
Dispenser	1	0	0	1	0	0	1
Sarana dan Prasarana Mebeleur							
Lemari Kayu	0	4	0	4	2	2	4
Rak Besi	2	0	0	2	2	2	2
Rak Kayu	1	0	0	1	1	0	1
Filing Cabinet Besi	2	3	0	5	1	5	5
Lemari Kaca	2	0	0	2	0	0	2
White Board	0	0	1	1	1	3	1
Meja Rapat	8	0	0	8	0	8	8
Meja Panjang	3	0	0	3	2	4	3
Meja ½ Biro	1	0	0	1	0	0	1
Kursi Rapat	70	0	0	70	0	30	70
Kursi Tamu	1	0	0	1	0	1	1
Bangku Tunggu	0	4	0	4	0	2	4
Sofa	1	0	0	1	0	3	1
Meubel Lainnya	1	0	0	1	0	0	1
Mimbar/Podium	0	0	1	1	0	1	1
Gordyin/Kray	0	0	0	0	0	8	0
Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	0	0	4	0	5	4
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	0	0	2
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0	0	0	4	0
Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	5	8	14	0	0	14
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	0	0	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0	0	0	4	0
Meja Kerja Pejabat Lainnya	0	4	0	4	0	0	4
Kusi Rapat Ruangan Rapat Staf	0	20	0	20	0	0	20

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

~~Tabel 2.8~~

~~Sarana Prasarana Kecamatan Prembun Tahun 2021~~

~~No.~~	~~Jenis Aset~~	~~Nama Aset~~	~~Jumlah~~	~~Satuan~~	~~Kondisi~~



1.	Tanah dan Bangunan	Tanah	151.977	M^2	Baik
		Gedung	6	Unit	Baik
		Rumah Dinas	1	Unit	Baik
2.	Kendaraan Operasional	Mobil	1	Unit	Baik
		Sepeda Motor	23	Unit	Baik
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laptop	11	Unit	Baik
		Personal Komputer Lainnya	3	Unit	Baik
		Printer	12	Unit	Baik
		A.C. Split	1	Unit	Baik
		Mesin Ketik Manual Portable	1	Unit	Baik
		Lemari Kayu	1	Unit	Baik
		Rak Besi	2	Unit	Baik
		Rak Kayu	2	Unit	Baik
		Filing Cabinet Besi	3	Unit	Baik
		Lemari Kaca	2	Unit	Baik
		White Board	1	Unit	Baik
		Meja Rapat	1	Unit	Baik
		Meja Panjang	3	Unit	Baik
		Meja ½ Biro	1	Unit	Baik
		Kursi Rapat	70	Unit	Baik
		Kursi Tamu	0	Unit	Baik
		Bangku Tunggu	4	Unit	Baik
		Sofa	1	Unit	Baik
		Meubel Lainnya	0	Unit	Baik
		Kipas Angin	2	Unit	Baik
		Televisi	1	Unit	Baik
		Amplifier	0	Unit	Baik
		Loundspeaker	3	Unit	Baik
		Sound System	1	Unit	Baik
		Tustel	1	Unit	Baik
		Dispenser	1	Unit	Baik
		Pemadam	1	Unit	Baik
		Gordyin/Kray	0	Unit	Baik
		Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Unit	Baik
		Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
		Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit	Baik



		Meja Kerja Pejabat Non Struktural	1	Unit	Baik
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	Baik
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Baik
		Meja Kerja Pejabat Lainnya	2	Unit	Baik
		Kusi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	Unit	Baik
		LCD Proyektor	1	Unit	Baik
		Screen Mate White Standard	0	Unit	Baik
		Speaker Aktif	0	Unit	———
		Audio Cassette Recorder	0	Unit	——
		Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
		Camera Digital SLR 600 D	1	Unit	Baik
		Audio Mixer	1	Unit	Baik
		Dynamic Microphon	3	Unit	Baik

Sumber : Sekretariat Kecamatan Prembun Tahun 2021

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Prembun secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Dapur, Ruang Arsip dan Aula Kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun

Berdasarkan sasaran/target ~~—~~Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Prembun ~~–~~Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prembun~~–~~. Dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (***input***), keluaran (***output***), hasil (***outcome***), manfaat (***benefis***) dan dampak (***impacts***). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sSumber ~~–~~dDaya mManusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Prembun dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.

~~a.~~ Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Prembun selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Prembun setiap tTahun dalam menunjang pPelayanan ke mMasyarakat ~~tidak~~ belum mencukupi, disebabkan pelayanan kepada ~~Publik~~ masyarakat bertambah, sehingga pPenyediaan aAlat tTulis kKantor setiap tTahun tidak ~~terpenuhi~~optimal.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan bBarang cCetakan dan pPenggandaan di Kecamatan Prembun setiap tTahun dalam menunjang kegiatan ~~tidak~~ belum mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan ~~tersebut~~ terbatas.



d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan pPeralatan dan pPerlengkapan kKantor di Kecamatan Prembun setiap tTahunnya mengalami penurunan, disebabkan PPeralatan dan pPerlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pPelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Prembun setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimaloptimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Prembun dirasa masih belum mencukupi, disbanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Prembun di Bidang Pemerintahan tercermin dari-:

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aAparat kKecamatan dan , dDesa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat kKecamatan dan , ddesa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan , desa dan kelurahan;



d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa dan kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; ~~dan kelurahan~~
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa; dan ~~dan kelurahan~~
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa ~~dan kelurahan~~.

5. Pelayanan di Bidang Pembangunan
a. Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang Desa ~~, Kelurahan~~ dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
b. Terselenggaranya pPenyaluran bantuan ~~Beras Raskin, dan~~ program-program sosial ~~lainnya~~;
c. Terselenggaranya fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Prembun ;
d. Terselenggaranya vVerifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
e. Terselenggara pPembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
f. Terselenggaranya pPembinaan anggota lLinmas dDesa ~~dan Kelurahan~~ di Kecamatan Prembun ;
g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN".

PATEN merupakan suatu s~~i~~ystem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

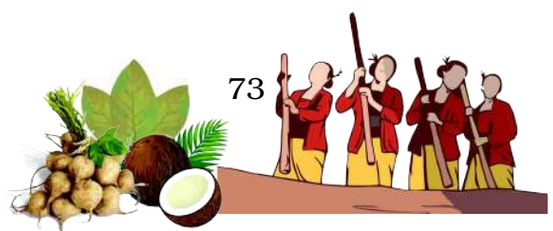
Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan pPemerintah kKecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN.

KKinerja pelayanan Kecamatan Prembun secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) ~~table~~ tabel berikut-:



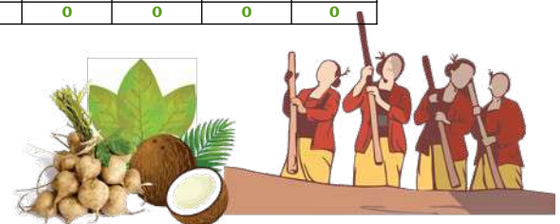


Tabel 2.41 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun -Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021



Tabel 2.9

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
	Terlaksananya surat-menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak serta pembayaran pajak kendaraan	Bulan	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	11	100	100	100	100	100	100 11
	Terlaksananya pemberian jasa administrasi keuangan kepada penajabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis keuangan dan staf administrasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya belanja alat-alat listrik dan elektronik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan jamuan makan dan minum tamu rapat SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	-	-	12	12	12	-	-	-	12	12	12	-	-	-	10094,50	100	10095,97	-
	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	1009,96	100	100	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Unit	3	2	3	2	3	7	3	2	3	2	3	7	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor kecamatan	Unit	-	-	-	32	-	- 0	-	-	-	32	-	-0	-	-	-	10032	-	-0
	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas camat	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1100
	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi gedung kantor	Un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		it																		
3	Program pengembangan data/informasi																			
	Tersusunnya Renja, Lakip, LKPJ, Evaluasi Renja, RKA dan DPA	Bbulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
4	Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah																			
	Terlaksananya pengembangan data/ informasi/Statistik daerah	Bbulan-	12 25	12 25	1225	1225	1225	126	12 12	12 12	1212	1212	1212	126	1004 8	10048	10048	10048	10048	100100
	Database dan profil desa	Desa	2213	1322	132	132	132	130	1322	1322	132	132	132	13-	100	100	100	100	100	100-
5	Program perencanaan daerah musrenbangcam																			
	Musrenbangcam	Bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Rakor dan IPMD	Desa	-0	-0	-0	-0	13	-0	-0	-0	-0	-0	13	-0	-0	-0	-0	-0	100	-0
6	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Bulan	22	22	10	10	10	12	22	22	10	10	10	12	100	100	100	100	100	12
	Kegiatan fasilitasi APBDesa	Kegiatan	2213	1322	1310	1310	1310	1312	1322	1322	1310	1310	1310	1312	100	100	100	100	100	10012
	Kegiatan fasilitasi program pembangunan	Kegiatan	1322	1322	1310	1310	1310	131	1322	1322	1310	1310	1310	131	10010 00	100100	100100	100100	100100	10012
7	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalianPrembun pelaksanaan kebijakan KDH																			
	Terselenggaranya fasilitasi PATEN	Bulan	12	12	12	12	12	12	1212	1212	1212	1212	1212	1212	100	100	100	100	100	100
8	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial																			
	Terlaksananya pendataan rumah tangga miskin oleh TKP2KDes	Kegiatan	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	10010 00	100100	100100	100100	100100	100100
9	Program peningkatan peran serta kepemudaan																			
	Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1100
	Kegiatan pembinaan sosial masyarakat	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Program peningkatan peran-peran perempuan di pedesaan	Desa	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	12	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pembinaan PKK	Ddesa	13	13	13	13	13	1312	13	13	13	13	13	1312	100	100	100	100	100	100
11	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	desa	13	13	13	13	13	12	13	13	13	13	13	1	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan pelatihan anggota LINMAS	Desa	13	13	13	13	13	131	1313	1313	1313	1313	1313	113	100	100	100	100	100	100
12	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100

Sumber–: Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Prembun-, 2021

Keterangan-: *) Angka Perkiraan



Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Prembun dirancang secara konseptual, analistias, realistis, rasional dan koemprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Prembun dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketenteraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Prembun_—Tahun 2016-20212116 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Prembun pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Prembun berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Prembun–, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kKasi dan kKasubbag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke_belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Prembun berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Prembun , menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Prembun tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.6 di_atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis



besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Prembun relatif optimal.



Tabel 2.42 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

~~*Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.*~~



~~Tabel 2.10~~

No.	Nama Program	Anggaran Tahun (ribu Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (ribu Rp)						Rasio Capaian Tahun ke- (%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	96.50	103.72	153.60	170.87	184.25	40.06	94.75	103.18	147.08	160.55	174.68	40.06	98.18	99.48	95.75	93.96	94.81	100.00	-11.288	-10.9376
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	21.97	34.20	36.00	103.00	85.00	4.00	21.97	34.20	36.00	102.85	84.55	4.00	100.00	100.00	100.00	99.85	99.46	100.00	-3.5942	-3.5942
3	Program pengembangan data/informasi	-	-	5.00	5.00	3.93	-	-	-	5.00	5.00	3.93	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	0	0
4	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	5.20	5.00	7.00	7.00	2.52	-	5.20	5.00	7.00	7.00	2.52	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-1.04	-1.04
5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.00	-	5.00	8.00	8.72	6.00	4.00	-	5.00	8.00	8.71	6.00	100.00	-	100.00	100.00	99.99	100.00	0.4	0.4
6	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	3.90	3.43	6.00	6.00	6.00	18.00	3.90	3.43	6.00	6.00	6.00	18.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.82	2.82
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	16.90	12.40	13.00	20.00	27.19	14.00	16.90	12.40	13.00	20.00	27.19	14.00	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-0.58	-0.579
8	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-	-	6.00	5.95	-	-	-	-	6.00	5.95	-	-	-	-	100.00	100.00	-	0	0
9	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
10	Program peningkatan peningkatan peran perempuan di perdesaan	42.00	55.00	102.00	102.00	14.97	15.00	42.00	55.00	102.00	102.00	14.97	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-5.4	-5.4
11	Program perencanaan pembangunan daerah	11.70	13.00	16.00	19.00	11.12	14.00	11.70	13.00	16.00	19.00	11.12	14.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.46	0.46

Sumber~~–~~: ~~Sub bagian Perencanaan dan Keuangan~~ Kecamatan Prembun~~-~~, 202~~1~~0

Keterangan~~-~~: *) Angka Perkiraan



Perkembangan aAnggaran ~~dan realisasi~~ belanja di Kecamatan Prembun dalam kurun waktu Tahun 2016-2021 secara jumlah keseluruh tidak mengalami banyak perubahan, hanya saja di Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yang ditujukan guna efisiensi dan refokusing penanganan pandemi covid 19. Dari 11 program yang ada pada Tahun 2021, penggunaan anggaran terbesar berada pada progam pelayanan administrasi perkantoran yaitu sebesar 36,07%, terdapat juga beberapa program yang tidak dialokasikan anggaran yaitu program pengembangan data/informasi, pengembangan data/informasi/statistik daerah, peningkatan peran serta kepemudaan, dan program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

~~memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dapat dilihat dari tabel nominal anggaran diatas selalu berubah selama periode terakhir yaitu tahun 2020-2021 mengalami penurunan belanja dan untuk perhitungan belanja rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 13,22%.~~Tidak dialokasikannya anggaran tersebut bukan berarti tidak dilaksanakan kegiatan yang mendukung program tersebut namun anggarannya didukung dari anggaran sekretariat yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, tentunya kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

~~2.4.~~ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Prembun selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal~~/ maksimal~~ tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan ~~kadang-kadang~~kadang menimbul~~a~~kan pertentangan, ~~untuk itu~~sehingga segala aspirasi tersebut kiranya ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;



5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Prembun_—harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Prembun , antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan **implementasi** *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Prembun dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam **implementasi** program pembangunan;
6.
7. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
8. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah di_dapat di Kecamatan Prembun–, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Prembun .



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

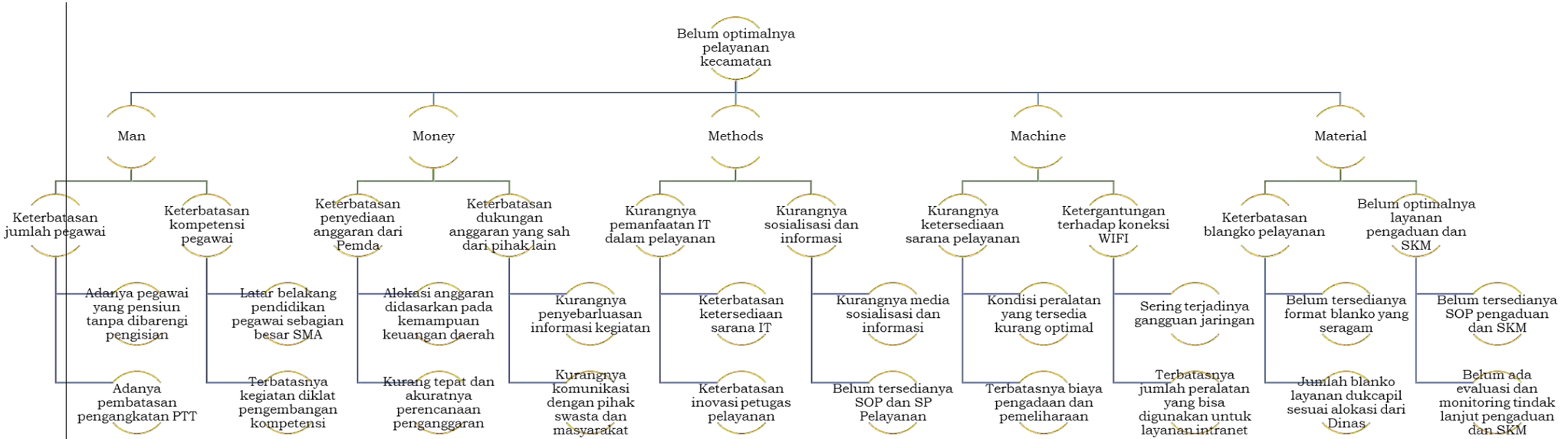
Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Prembun sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Prembun dan sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Permasalahan di Kecamatan Prembun



yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:



Bagan 3. 1 Pohon Masalah Pelayanan Kecamatan Prembun



Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Prembun

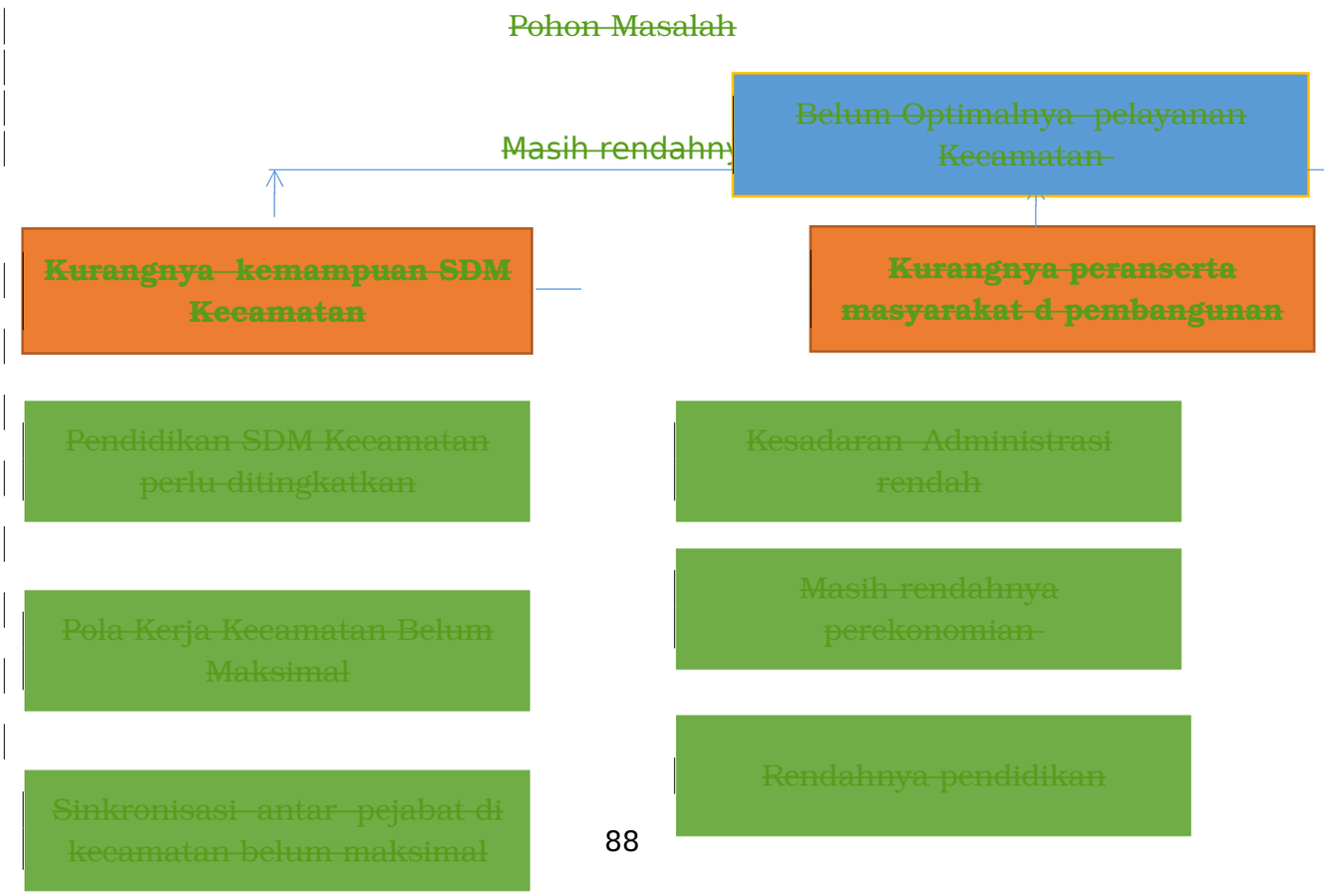
~~Bagan 3.1.~~

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Keterbatasan jumlah pegawai	Adanya pegawai yang pensiun tanpa dibarengi pengisian	Keterbatasan jumlah formasi pengangkatan pegawai
		Adanya pembatasan pengangkatan PTT	Adanya larangan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya sejak adanya PP 48 Tahun 2005
	Keterbatasan kompetensi pegawai	Latar belakang pendidikan pegawai sebagian besar SMA	Sebagian besar sudah berusia > 50 tahun dan tidak berkeinginan melanjutkan studi
		Terbatasnya kegiatan diklat pengembangan kompetensi	Keterbatasan akses informasi penyelenggaraan diklat kompetensi
	Keterbatasan penyediaan anggaran dari Pemda	Alokasi anggaran didasarkan pada kemampuan keuangan daerah	Penyusunan plafon didasarkan prioritas pencapaian visi misi Bupati
		Kurang tepat dan akuratnya perencanaan penganggaran	Keterbatasan data dukung perencanaan
			Keterbatasan kemampuan pegawai dalam menganalisa data
	Keterbatasan dukungan anggaran yang sah dari pihak lain	Kurangnya penyebarluasan informasi kegiatan	Belum adanya petugas khusus yang menangani data dan informasi
		Kurangnya komunikasi dengan pihak swasta dan masyarakat	Belum terjalinnya komunikasi dengan pihak swasta dan masyarakat
	Kurangnya pemanfaatan IT dalam pelayanan	Keterbatasan ketersediaan sarana IT	Adanya anggapan belum menjadi prioritas utama, sehingga belum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
			dianggarkan optimal
		Keterbatasan inovasi petugas pelayanan	Kurangnya referensi inovasi yang bisa diakses
	Kurangnya sosialisasi dan informasi	Kurangnya media sosialisasi dan informasi	Kurangnya inovasi dan motivasi dalam penyusunan media sosialisasi dan informasi
		Belum tersedianya SOP dan SP Pelayanan	Belum terukurnya KPI (*Key Performance Indicators*).
			Belum adanya pegawai yang menjadi PIC (***person in charge***) untuk membuat dan memastikan SOP dijalankan
			Belum terbiasa menuliskan cheklist dan instruksi kerja dalam sebuah bagan alur
	Kurangnya ketersediaan sarana pelayanan	Kondisi peralatan yang tersedia kurang optimal	Sebagian besar peralatan yang tersedia sudah tidak berfungsi optimal sesuai kebutuhan
		Terbatasnya biaya pengadaan dan pemeliharaan	Adanya anggapan belum menjadi prioritas utama, sehingga belum dianggarkan optimal, setelah rusak baru diperbaiki
	Ketergantungan terhadap koneksi WIFI	Sering terjadinya gangguan jaringan	Gangguan terjadi ketika tower telekomunikasi mengalami kerusakan atau terkena sambaran petir
		Terbatasnya	Setting

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		jumlah peralatan yang bisa digunakan untuk layanan intranet	penggunaan komputer dengan jaringan intranet dibatasi untuk 1 perangkat
	Keterbatasan blangko pelayanan	Belum tersedianya format blanko yang seragam	Masing-masing desa dan instansi mengeluarkan format sesuai kebutuhan
		Jumlah blanko layanan dukcapil sesuai alokasi dari Dinas	Pembagian blanko dibagi per kecamatan secara proporsional dan kebutuhan riil di lapangan
	Belum optimalnya layanan pengaduan dan SKM	Belum tersedianya SOP pengaduan dan SKM	Belum terbiasa menuliskan cheklist dan instruksi kerja dalam sebuah bagan alur
		Belum ada evaluasi dan monitoring tindak lanjut pengaduan dan SKM	Belum adanya petugas khusus yang memastikan telah dilakukan evaluasi dan monitoring

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021



~~Tabel 3.1~~

~~Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Prembun~~

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Prembun memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui



pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang *responsive* serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis



Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan risiko bencana ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
10. Penguatan kebijakan penanggulangan risiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput ke rumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
   Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan *output* Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegrasi dan bersih, stop korupsi, gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan informasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen *modern and smart city*, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan

masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart city

10. **Tempe Manist**, program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara *online*.
12. **Permisi,** program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot,** program pelayanan jemput bola
15. **Maning Dasirah,** program reformasi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat
16. **Leterline**, program *open tender and e-proc* (lelang terbuka dan *online*)
17. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
18. **Wament**, program pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Prembun adalah sebagai berikut:

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Prembun lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Prembun harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;

3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



Tabel 3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi



masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah:

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG's di Kecamatan Prembun sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 13 Desa di Kecamatan Prembun, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 13 Desa.

   Kendala:

   a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
   b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Prembun ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3 Telaahan KLHS Terkait Tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya potensi permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Sumber: KLHS Kabupaten Kebumen

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan telaah RTRW dan KLHS. Telaah yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Kecamatan Prembun agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan covid-19 di Kecamatan Prembun.
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Prembun.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Prembun.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Prembun.





BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai institusi kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi Bupati Kebumen yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Tujuan Rencana Strategis yang akan dicapai Kecamatan yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya indeks pelayanan masyarakat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam di bawah ini:



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Prembun	indeks	81,31	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran: jangka menengah pelayanan kecamatan Prembun kabupaten kebumen dari tahun 2021 – 2026 berupa meningkatnya pelayanan publik dikecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 86,34,target sasaran di tahun 2023 sebesar 88,36, target sasaran di tahun 2024 sebesar 90,38, target sasaran di tahun 2025 sebesar 91,40, target sasran di tahun 2025 sebesar 92,42, target sasaran di tahun 2026 sebesar 92,42.



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Prembun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik **kecamatan**	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Sumber: Kecamatan Prembun, 2021

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Prembun selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).



2. Eksternal

   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Prembun sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan *data base* kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.



BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

4.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Prembun . Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Prembun tahun



2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Prembun sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100 %	1.820.92.000	100 %	1.910.152.000	100 %	1.910.152.000	100 %	1.910.152.000	100 %	2.165.441.727	100 %	10.899.218.834		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	100 %	7.000.000	100 %	7.210.000	100 %	7.426.300	100 %	7.649.089	100 %	7.878.562	100 %	37.163.951		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP)	8 Dok	6 Dok	6 Dok	5.000.000	6 Dok	5.090.000	6 Dok	5.182.700	6 Dok	5.278.181	6 Dok	5.376.526	30 Dok	15.927.407	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKIP, SAKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, Delev, SPIP)	4 Dok	4 Dok	6 Dok	4.000.000	6 Dok	4.120.000	6 Dokumen	4.243.600	6 Dokumen	4.370.908	6 Dokumen	4.502.035	35 Dokumen	21.236.543	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	100%	100 %	1.698.841.000	100 %	1.749.806.230	100 %	1.715.098.230	100 %	1.766.551.087	100 %	1.819.547.980	100 %	8.749.844.526		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	17 orang	17 orang	17 orang	1.684.141.000	17 orang	1.734.665.230	17 orang	1.699.503.000	17 orang	1.750.488.000	17 orang	1.803.003.000	80 Orang	8.671.800.230	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	1 Jenis	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	17 orang	-	5 Jenis	-	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	2 Dokumen	4 orang	4 orang	14.700.000	4 orang	15.141.000	4 orang	15.595.230	4 orang	16.063.087	4 orang	16.544.980	56 Orang	78.044.296		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah|	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	100%	100 %	55.106.000	100 %	56.759.180	100 %	58.461.955	100 %	60.215.814	100 %	52.165.000	100 %	282.707.949		
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	7.210.000	12 Bulan	7.426.300	12 Bulan	7.649.089	12 Bulan	7.878.562	60 Bulan	37.163.951	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen



		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	13.390.000	12 Bulan	13.791.700	12 Bulan	14.205.451	12 Bulan	14.631.615	60 Bulan	69.018.766	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8.606.000	12 Bulan	8.864.180	12 Bulan	9.130.105	12 Bulan	9.404.009	12 Bulan	9.686.129	60 Bulan	45.690.423	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Suara Merdeka)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.545.000	12 Bulan	1.591.350	12 Bulan	1.639.091	12 Bulan	1.688.263	60 Bulan	7.963.704	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.450.000	12 Bulan	15.913.500	12 Bulan	16.390.905	12 Bulan	16.882.632	60 Bulan	79.637.037	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.300.000	12 Bulan	10.609.000	12 Bulan	10.927.270	12 Bulan	11.255.088	60 Bulan	53.091.358	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100%	100%	100 %	57.000.000	100 %	58.710.000	100 %	60.471.300	100 %	62.285.439	100 %	102.280.366	100 %	340.747.105		
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	50 unit	17 unit	8 unit	20.000.000	8 unit	20.600.000	8 unit	21.218.000	8 unit	21.854.540	8 unit	60.636.540	4 Unit	144.309.080	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	6 unit	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.600.000	3 Unit	21.218.000	3 Unit	21.854.540	3 Unit	22.510.176	10 Paket	106.182.716	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya		-	5 Unit	13 unit	17.000.000	13 unit	17.510.000	13 unit	18.035.300	13 unit	18.576.359	13 unit	19.133.650	3 Unit	90.255.309	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	-	100 %	62.024.000	100 %	63.884.720	100 %	65.801.262	100 %	288.670.953	100 %	69.808.558	100 %	550.189.493		
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.024.000	12 Bulan	2.084.720	12 Bulan	2.147.262	12 Bulan	2.211.679	12 Bulan	2.278.030	60 Bulan	10.745.691	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	36.050.000	12 Bulan	37.131.500	12 Bulan	38.245.445	12 Bulan	39.392.808	60 Bulan	185.819.753	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.750.000	12 Bulan	26.522.500	12 Bulan	27.318.175	12 Bulan	28.137.720	60 Bulan	132.728.395	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	100%	100 %	101.000.000	100 %	104.030.000	100 %	107.230.900	100 %	110.447.827	100 %	113.761.262	100 %	536.469.989		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	11 Unit	24 Unit	30.000.000	24 Unit	30.900.000	24 Unit	31.907.000	24 Unit	32.864.210	24 Unit	33.850.136	55 unit	159.521.346	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan	0	0	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0	-	0	0



				rutin/berkala mobeleur															
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	17 Unit	11 unit	8.000.000	11 unit	8.240.000	11 unit	8.487.200	11 unit	8.741.816	11 unit	9.004.070	60 Bulan	42.473.086	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	63.000.000	1 Unit	64.890.000	1 Unit	66.836.700	1 Unit	68.841.801	1 Unit	70.907.055	5 Unit	334.475.556	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	100 %	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	62.000.000	100 %	67.749.074	100 %	69.781.546	100 %	329.166.420		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	100 %	62.000.000	100 %	63.860.000	100 %	65.775.800	100 %	67.749.074	100 %	69.781.546	100 %	329.166.420		
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (SIUP Kecil, Rekom IMB, Rekom Ijin Lingkungan)	-	3 Jenis	1 Jenis	2.000.000	1 Jenis	2.060.000	1 Jenis	2.121.800	1 Jenis	2.185.454	1 Jenis	2.251.018		10.618.272	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kependirian	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, dan KIA)	12 Bulan	10 Jenis	6 Jenis	60.000.000	6 Jenis	61.800.000	6 Jenis	63.654.000	6 Jenis	65.563.620	6 Jenis	67.530.529		318.548.149	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100%	100%	100 %	21.000.000	100 %	21.630.000	100 %	22.278.900	100 %	22.947.267	100 %	69.831.000	100 %	157.687.167		
		7.01.06.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	100 %	21.000.000	100 %	21.630.000	100 %	22.278.900	100 %	22.947.267	100 %	23.635.685	100 %	111.491.852		
		7.01.06.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kerukunan Negara	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	21.000.000	1 Kegiatan	21.630.000	1 Kegiatan	22.278.900	1 Kegiatan	22.947.267	1 Kegiatan	23.635.685		111.491.852	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	100%	100%	100 %	103.000.000	100 %	221.298.000	100 %	99.968.000	100 %	124.072.000	100 %	115.200.000	100 %	558.595.120		



		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan tersosasi	100%	100%	100 %	103.000.000	100 %	119.963.120	100 %	108.588.000	100 %	111.844.000	100 %	115.200.000	100 %	558.595.120		
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	16.000.000	13 Desa	22.050.000	13 Desa	22.711.000	13 Desa	23.392.000	13 Desa	24.094.000	80 Desa	108.247.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	-	-	-	16.000.000	3 Desa	15.000.000	-	-	10 Desa	50.000.000		-	13 Desa	65.000.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	13 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	5.680.000	1 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	6.025.000	1 Dokumen	6.206.000	5 Dokumen	38.761.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketantraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketantraman dan ketertiban umum	13 Desa	1 Kegiatan	2 Kegiatan	7.000.000	2 Kegiatan	10.534.000	2 Kegiatan	10.850.000	2 Kegiatan	11.175.000	2 Kegiatan	11.510.000	10 Kegiatan	51.069.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes/kel	-	13 desa	13 desa	18.000.000	13 desa	16.958.000	13 desa	17.466.000	13 desa	17.990.000	13 desa	18.530.000	65 Desa	88.944.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan musrenbangcam	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		5 Kali		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	13 Desa	6 Kegiatan	6 Kegiatan	22.000.000	6 Kegiatan	38.156.120	6 Kegiatan	39.779.000	6 Kegiatan	40.972.000	6 Kegiatan	42.201.000	5 Kegiatan	183.108.120	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMDes	13 Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	5 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	5 Kegiatan		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan fasilitasi UKS	-	1 Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	5 Kegiatan		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan pendampingan Desa (Bansos Sembako)	-	1 Kegiatan	13 Desa	9.000.000	13 Desa	11.585.000	13 Desa	11.932.000	13 Desa	12.290.000	13 Desa	12.659.000	5 Kegiatan	57.466.000	Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen
				Jumlah kegiatan fasilitasi TKP2KDes	13 Desa	1 Kegiatan	13 Desa		13 Desa		13 Desa		13 Desa		13 Desa	5 Kegiatan		Kec.Prembun	Kabupaten Kebumen



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Prembun. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Prembun	Indek	81,31	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	92,42

Tabel 7.1 Indikator *Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026*

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026



Tabel 7.2 Indikator Kinerja IKU Urusan

No	Indikator	Rumus
A.	**Indikator IKU Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
1.	**Urusan Kewilayahan**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Prembun
2.	**Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Desa/Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Prembun



BAB VIII
PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi Renstra 2016-2021 bahwa masalah yang mendesak di Kecamatan Prembun diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Prembun diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan Musrenbang.

Kecamatan Prembun memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Prembun selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Prembun. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

8.1. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan



tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Prembun, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Prembun Kabupaten Prembun. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Prembun sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Prembun berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Rencana strategis Kecamatan Prembun merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Prembun berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.



Renstra Kecamatan Prembun Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Mengetahui,

CAMAT PREMBUN

Dra.Hj. FARITA LISTIYATI, M.Si
Pembina
NIP. 19690515 19902 2 004

